

EFEKTIVITAS KARTU INDONESIA PINTAR DALAM MENGURANGI KESENJANGAN AKSES PENDIDIKAN DI KOTA SURABAYA

**Faranova Aulia Rizkilah¹⁾, Zalfa' Rona Aulia²⁾, Indah Prabawati³⁾, Firre An
Suprpto⁴⁾**

^{1),2),3),4)}Universitas Negeri Surabaya

**Email : 001faraa@gmail.com¹⁾, zalfaronaaulia@gmail.com²⁾, indahprabawati@unesa.ac.id³⁾,
firresuprpto@unesa.ac.id⁴⁾**

Abstract: *This article aims to analyze the effectiveness of the Indonesia Smart Card (Kartu Indonesia Pintar/KIP) Program in reducing disparities in access to education in the City of Surabaya. The study employs a descriptive qualitative approach, with data obtained through literature review and secondary data from government reports and publications related to education. The results show that the KIP Program plays a role in assisting students from underprivileged families through educational financial aid, thereby increasing school participation and reducing the risk of dropping out. However, the implementation of the program still faces several challenges, such as the accuracy of beneficiary targeting, uneven socialization, and less-than-optimal coordination among institutions. Overall, the KIP Program is considered fairly effective in supporting equal access to education in the City of Surabaya, although improvements are still needed in data collection, supervision, and program implementation so that its benefits can be felt more evenly.*

Keywords: *Kartu Indonesia Pintar, Policy Effectiveness, Access To Education, Policy Implementation, Surabaya.*

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam mengurangi kesenjangan akses pendidikan di Kota Surabaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data yang diperoleh melalui studi literatur dan data sekunder dari laporan pemerintah serta publikasi terkait pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program KIP berperan dalam membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu melalui bantuan biaya pendidikan, sehingga dapat meningkatkan partisipasi sekolah dan mengurangi risiko putus sekolah. Namun, implementasi program masih menghadapi beberapa kendala, seperti ketepatan sasaran penerima, sosialisasi yang belum merata, serta koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Secara keseluruhan, Program KIP dinilai cukup efektif dalam mendukung pemerataan akses pendidikan di Kota Surabaya, meskipun masih diperlukan perbaikan dalam aspek pendataan, pengawasan, dan pelaksanaan program agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata.

Kata Kunci: Kartu Indonesia Pintar, Efektivitas Kebijakan, Akses

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Melalui pendidikan, masyarakat dapat meningkatkan keterampilan, produktivitas, serta memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik. Namun, pemerataan akses pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah. Faktor biaya pendidikan, perlengkapan sekolah, dan transportasi sering menjadi penyebab siswa mengalami kesulitan melanjutkan pendidikan bahkan berisiko putus sekolah (Suryadi, 2020).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah meluncurkan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) sejak tahun 2014. Program ini bertujuan membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Pada tahun 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp13,4 triliun untuk PIP dengan target penerima mencapai 18,5 juta siswa di seluruh Indonesia. Bantuan yang diberikan meliputi Rp450.000 per tahun untuk siswa SD, Rp750.000 untuk SMP, dan hingga Rp1,8 juta untuk SMA/SMK. Data tersebut menunjukkan bahwa Program KIP menjadi salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam menekan angka putus sekolah dan meningkatkan partisipasi pendidikan nasional.

Di Kota Surabaya, pelaksanaan Program KIP juga menjadi perhatian pemerintah daerah karena masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi rentan. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Surabaya, ribuan siswa dari keluarga kurang mampu menerima bantuan pendidikan setiap tahunnya guna mendukung kebutuhan sekolah dan mengurangi beban ekonomi keluarga. Program ini dinilai membantu meningkatkan keberlanjutan pendidikan siswa, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa kendala seperti ketidaktepatan data penerima, keterlambatan pencairan bantuan, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat (Putra & Rahmawati, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Program Kartu Indonesia Pintar dalam mengurangi kesenjangan akses pendidikan di Kota Surabaya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program, hambatan yang dihadapi, serta kontribusi Program KIP terhadap peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sehingga dapat

menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas kebijakan pendidikan di masa mendatang.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan kebijakan publik yang telah dirumuskan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif. Menurut George C. Edwards III, implementasi kebijakan adalah tahap penting dalam proses kebijakan publik karena keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada perumusan kebijakan, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di lapangan (Edwards III, 1980). Implementasi yang tidak berjalan optimal dapat menyebabkan tujuan kebijakan gagal dicapai meskipun kebijakan telah dirancang dengan baik. Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III menekankan empat variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berkaitan dan menentukan efektivitas pelaksanaan suatu program pemerintah.

2. Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III

Menurut Edwards III (1980), komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena berkaitan dengan proses penyampaian informasi kepada pelaksana maupun kelompok sasaran kebijakan. Komunikasi yang baik ditandai dengan kejelasan informasi, konsistensi pesan, dan kemudahan pemahaman terhadap tujuan kebijakan. Dalam pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), komunikasi diperlukan agar masyarakat memahami prosedur, persyaratan, dan mekanisme penerimaan bantuan pendidikan. Kurangnya sosialisasi dapat menyebabkan masyarakat tidak memperoleh informasi secara maksimal sehingga menghambat efektivitas program (Winarno, 2016).

Faktor kedua adalah sumber daya, yaitu segala bentuk dukungan yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan, seperti sumber daya manusia, anggaran, informasi, dan fasilitas pendukung. Edwards III menyatakan bahwa kebijakan tidak akan berjalan efektif apabila pelaksana tidak memiliki sumber daya yang memadai. Dalam konteks Program KIP, ketersediaan dana bantuan, kemampuan aparaturnya pelaksana, serta sistem pendataan penerima bantuan menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan program (Subarsono, 2019).

Faktor ketiga yaitu disposisi pelaksana, yang berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kesediaan pelaksana kebijakan dalam menjalankan program. Pelaksana yang memiliki komitmen tinggi akan lebih mendukung tercapainya tujuan kebijakan dibandingkan pelaksana yang kurang responsif terhadap kebijakan yang dijalankan. Disposisi yang baik dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan ketepatan pelaksanaan program bantuan pendidikan (Agustino, 2020).

Faktor terakhir adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme organisasi, pembagian tugas, standar operasional prosedur (SOP), dan koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas dapat mempermudah proses pelaksanaan program dan meminimalkan hambatan administratif. Dalam implementasi Program KIP, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan lembaga penyalur bantuan menjadi faktor penting agar program dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran (Tachjan, 2018).

3. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Program Kartu Indonesia Pintar merupakan bagian dari Program Indonesia Pintar (PIP) yang diluncurkan pemerintah sejak tahun 2014 untuk membantu peserta didik dari keluarga miskin dan rentan miskin agar tetap memperoleh akses pendidikan. Program ini bertujuan mengurangi angka putus sekolah, meningkatkan partisipasi pendidikan, dan memperluas pemerataan akses pendidikan di Indonesia. Bantuan pendidikan diberikan kepada siswa jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK sesuai ketentuan pemerintah.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Program KIP memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu. Penelitian oleh Rahmawati (2021) menunjukkan bahwa bantuan KIP membantu meringankan biaya pendidikan dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Namun demikian, penelitian lain juga menemukan adanya kendala dalam implementasi program seperti ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, keterlambatan pencairan dana, serta kurang optimalnya proses pendataan penerima bantuan (Putra & Rahmawati, 2021).

Dalam konteks Kota Surabaya, implementasi Program KIP menjadi penting karena masih terdapat kesenjangan akses pendidikan pada masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, teori implementasi kebijakan dari Edwards III digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar dalam mengurangi kesenjangan akses pendidikan di Kota Surabaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam mengurangi kesenjangan akses pendidikan di Kota Surabaya. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman secara mendalam mengenai implementasi kebijakan pendidikan serta berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan program KIP. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dokumen kebijakan pemerintah, laporan Kementerian Pendidikan, serta data dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang berkaitan dengan Program Kartu Indonesia Pintar dan pemerataan akses pendidikan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai referensi yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui proses pengelompokan, reduksi, dan penafsiran data untuk mengetahui efektivitas implementasi Program KIP dalam mengurangi kesenjangan akses pendidikan di Kota Surabaya. Keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai referensi dan dokumen yang berbeda agar data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Di Kota Surabaya, program ini memiliki peran penting dalam membantu siswa memenuhi kebutuhan pendidikan sehingga dapat mengurangi hambatan ekonomi yang menjadi penyebab kesenjangan akses pendidikan dan putus sekolah. Bantuan KIP digunakan untuk kebutuhan perlengkapan sekolah, transportasi, serta biaya penunjang pendidikan lainnya sehingga siswa dari keluarga kurang mampu dapat tetap melanjutkan pendidikan.

Berdasarkan data tahun 2025, sekitar 15.000 siswa di wilayah Surabaya dan Sidoarjo menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dan KIP. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu meringankan biaya pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu sehingga mereka dapat tetap bersekolah dan memenuhi kebutuhan belajar sehari-hari. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga menyalurkan bantuan pendidikan bagi 6.144 pelajar SMA/SMK dari keluarga miskin berupa perlengkapan sekolah gratis dan bantuan pendidikan bulanan guna menekan risiko putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Bantuan tersebut menunjukkan

adanya dukungan pemerintah daerah terhadap pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Program KIP tidak hanya berpengaruh pada pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga membuka akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu di Surabaya. Berdasarkan data UTBK SNBT tahun 2025, sebanyak 83.539 peserta atau sekitar 33,22% dari total peserta yang lolos seleksi nasional merupakan penerima KIP Kuliah. Data tersebut menunjukkan bahwa bantuan pendidikan pemerintah memberikan peluang yang lebih besar bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.

Di Kota Surabaya, Universitas Negeri Surabaya menjadi perguruan tinggi dengan jumlah penerima KIP Kuliah terbanyak di Indonesia pada jalur SNBT tahun 2025, yaitu mencapai 3.252 mahasiswa penerima bantuan. Bahkan, Unesa mempertahankan posisi tersebut selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2023 jumlah penerima KIP Kuliah di Unesa mencapai 4.239 mahasiswa, sedangkan pada tahun 2024 sebanyak 3.014 mahasiswa. Tingginya jumlah penerima bantuan pendidikan di Unesa menunjukkan bahwa program KIP berkontribusi besar dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu di Surabaya.

Selain Unesa, Universitas Airlangga juga menerima ratusan mahasiswa penerima KIP Kuliah. Pada tahun 2025, sebanyak 531 calon mahasiswa penerima KIP Kuliah diterima melalui jalur SNBT di Universitas Airlangga dari total 12.376 pendaftar KIP Kuliah. Sementara itu, pada jalur lainnya UNAIR menerima sekitar 690 calon penerima KIP Kuliah pada tahun 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa perguruan tinggi di Surabaya memiliki kontribusi besar dalam mendukung pemerataan pendidikan tinggi melalui program KIP Kuliah.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, efektivitas Program KIP di Kota Surabaya dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dari aspek komunikasi, pemerintah dan sekolah telah melakukan sosialisasi terkait mekanisme penerimaan bantuan, namun penyebaran informasi belum sepenuhnya merata sehingga masih terdapat masyarakat yang kurang memahami prosedur pengajuan bantuan. Dari aspek sumber daya, bantuan dana pendidikan yang diberikan cukup membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah maupun biaya kuliah. Akan tetapi, proses pendataan penerima bantuan masih menghadapi kendala ketidaktepatan sasaran akibat perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang dinamis.

Pada aspek disposisi pelaksana, pihak sekolah, perguruan tinggi, dan aparat pemerintah umumnya memiliki komitmen yang baik dalam membantu proses penyaluran bantuan pendidikan kepada siswa dan mahasiswa kurang mampu. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi masih ditemukan kendala administratif seperti keterlambatan verifikasi data dan pencairan bantuan sehingga proses penyaluran bantuan belum sepenuhnya optimal.

Secara keseluruhan, Program Kartu Indonesia Pintar di Kota Surabaya cukup efektif dalam membantu mengurangi kesenjangan akses pendidikan. Hal ini terlihat dari banyaknya siswa dan mahasiswa penerima bantuan pendidikan, meningkatnya akses masyarakat kurang mampu terhadap pendidikan tinggi, serta adanya dukungan pemerintah daerah dalam menekan angka putus sekolah. Program KIP membantu mengurangi hambatan ekonomi sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pendidikan yang layak. Namun demikian, optimalisasi program masih diperlukan melalui peningkatan akurasi pendataan penerima bantuan, pemerataan sosialisasi, serta penguatan koordinasi antar lembaga pelaksana agar bantuan pendidikan dapat tersalurkan secara lebih tepat sasaran dan merata.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) memiliki peran penting dalam meningkatkan akses pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu di Kota Surabaya. Program ini membantu meringankan beban biaya pendidikan sehingga siswa dapat memenuhi kebutuhan sekolah dan tetap melanjutkan pendidikan. Selain itu, KIP juga berkontribusi dalam mengurangi hambatan ekonomi yang menjadi salah satu penyebab utama putus sekolah.

Implementasi Program KIP di Kota Surabaya secara umum sudah berjalan cukup baik dan memberikan dampak positif terhadap pemerataan akses pendidikan. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah penerima bantuan pendidikan serta adanya dukungan pemerintah daerah dalam membantu siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin. Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa kendala, seperti ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, kurang optimalnya pendataan, serta kendala administratif dalam proses verifikasi dan penyaluran bantuan.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, efektivitas Program KIP dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, optimalisasi pelaksanaan program masih diperlukan agar manfaat

bantuan pendidikan dapat dirasakan secara lebih merata, tepat sasaran, dan mampu mendukung tercapainya pemerataan pendidikan di Kota Surabaya.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam mengurangi kesenjangan akses pendidikan di Kota Surabaya. Rekomendasi ini ditujukan kepada pemerintah, dinas pendidikan, sekolah, serta pihak terkait lainnya agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

1. Pemerintah perlu memperkuat integrasi dan pembaruan data penerima bantuan secara berkala agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran sesuai kondisi ekonomi masyarakat.
2. Sosialisasi Program KIP perlu ditingkatkan melalui sekolah, media digital, dan masyarakat agar informasi mengenai persyaratan dan mekanisme bantuan dapat dipahami secara lebih luas.
3. Koordinasi antara pemerintah, dinas pendidikan, sekolah, dan lembaga terkait perlu diperkuat untuk memperlancar proses verifikasi data dan penyaluran bantuan pendidikan.
4. Transparansi dan pengawasan dalam pelaksanaan program perlu ditingkatkan untuk meminimalkan kesalahan distribusi bantuan serta mencegah terjadinya ketidaktepatan penerima manfaat.
5. Pemerintah perlu melakukan evaluasi program secara berkala berdasarkan dampak yang dihasilkan, seperti peningkatan partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah, agar efektivitas Program KIP dapat terus ditingkatkan..

DAFTAR PUSTAKA

- Umanto, S.E. (2025). Efektivitas Program Indonesia Pintar dalam mengatasi kesenjangan biaya pendidikan. *JAMP: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 17-39.
- Ramadhana Aulia Wisdawati1, M. H. (2025). Apakah Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Efektif sebagai Instrumen Pembangunan untuk Meningkatkan Akses Pendidikan Tinggi?. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 15(2), 390-399.
- Albert, M., Masduki, & Rochimah, H. (2025). Efektivitas program bantuan pendidikan dalam mengurangi putus sekolah di Indonesia: Evaluasi implementasi Kartu Indonesia Pintar. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(2), 718–727.

- Pratama, R. A., & Ridho, W. F. (2023). KIP-K: Meningkatkan kesejahteraan melalui pendidikan di Surabaya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(1).
- Rahmawati, N. (2020). Analisis implementasi kebijakan bantuan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 45–56.
- Putra, A., & Rahmawati, D. (2021). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar dalam meningkatkan akses pendidikan masyarakat kurang mampu. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 115–124.
- Sari, N., & Pratama, R. (2022). Analisis implementasi Program Indonesia Pintar dalam pemerataan akses pendidikan. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 6(2), 101–110.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). Program Indonesia Pintar (PIP). Diakses dari PIP Kemdikbud
- Pemerintah Kota Surabaya. (2025). Pemkot Surabaya Bagikan Perlengkapan Sekolah Gratis bagi 6.144 Pelajar SMA/SMK Keluarga Miskin. Diakses dari Surabaya.go.id.